

ARTIKEL

PEMETAAN POTENSI WILAYAH UNTUK MENUNJANG KEBIJAKAN PANGAN KABUPATEN PACITAN

Abstract

This study aims to provide advice in the form of mapping the area for the development of food policy in Pacitan Regency. Research results through secondary data collection technique of the Central Bureau of statistics the next Pacitan Regency analyzed using techniques scalling indicates that food sweet potato is very well developed in the subdistrict include Donorojo, Pacitan Punung, Pacitan, Pringkuku, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tegalombo and Tulakan. Local government development policy has led to an increase in the food had not yet led to an increase in the availability of plant sweet potatoes along with a town developed. Therefore, the local government needs to devise a policy of pacitan Regency foodstuffs suitable potential regions match the characteristics of the region.

Keyword : Potential, Area, Food Policy.

Burhanudin Mukhamad Faturahman

E-mail: burhanmfatur@gmail.com

Alumni Pascasarjana Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya

A. PENDAHULUAN Administrasi

sebagaimana yang diungkapkan oleh Hakim (2011) dimaksudkan untuk mengelola berbagai kegiatan yang berhubungan dengan cara mengarahkan kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sehingga kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan merupakan bagian dari administrasi. Sedangkan administrasi yang berkaitan dengan pembangunan cenderung menggunakan pendekatan manajemen pembangunan sehingga perencanaan pembangunan, pengerahan sumberdaya diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumberdaya yang tersedia.

Kebutuhan akan pembangunan itu sendiri dapat dilihat pada sektor pertanian dimana sektor ini merupakan sektor penyokong utama pembangunan di Indonesia.

Menurut Yustika (2002) pertanian merupakan sektor yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan bahan pangan masyarakat. Jika dalam konteks daerah, maka upaya pemenuhan kebutuhan pangan tersebut mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat sesuai potensi bahan pangan yang tersedia.

Kabupaten Pacitan merupakan daerah yang pembangunannya masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto kurun waktu 2010-2012 menunjukkan angka 37,15% lebih

besar dari sektor lainnya. Selanjutnya, bahan pangan merupakan penyumbang terbesar sektor pertanian dari tahun 2010-2012 namun terus mengalami penurunan dari 38,04% di tahun 2010 dan 36,56% di tahun 2012. Mengingat pentingnya kebutuhan akan bahan pangan maka penulis merumuskan masalah Bagaimana potensi tanaman bahan pangan di Kabupaten Pacitan dan Bagaimana Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan daerah.

Tabel 1. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Sektor Pertanian (%) 2008-2012

Sektor/subsektor	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	39,92	39,21	38,04	37,15	36,56
1. tanaman bahan makanan	20,47	20,07	19,16	18,38	17,70
2. tanaman perkebunan	10,26	9,81	9,43	9,06	8,80
3. peternakan	6,05	6,03	6,14	6,30	6,43
4. kehutanan	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
5. perikanan	3,08	3,23	3,23	3,23	3,55

Sumber: PDRB BPS Kab. Pacitan 2008-2012

Tujuan penelitian adalah mengetahui potensi bahan pangan Kabupaten Pacitan dan mengetahui kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan daerah. Manfaat penelitian bagi pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu sebagai pendoman penyusunan kebijakan bahan pangan serta memperkuat

ketersediaan pangan Kabupaten Pacitan.

Tinjauan Teoritis

Administrasi Pembangunan

Administrasi berkaitan dengan pencapaian tujuan sehingga administrasi muncul atas dasar kebutuhan manusia untuk bekerja sama dimana memberikan nilai (kegunaan) kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan diartikan oleh Zauhar (1992:6)

sesuatu yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok sehingga secara konseptual administrasi adalah *Universal Application* yang merupakan sarana dalam mencapai suatu tujuan. Pengertian Administrasi tersebut dibagi beberapa rumusan yaitu:

1. Administrasi Sebagai Tata Usaha

Pengertian administrasi diambil dari bahasa belanda "*administratie*" dengan pengertian sebagai pekerjaan ketatausahaan dan kesekretarian. Pekerjaan yang dimaksud adalah tentang surat-menyurat, pencatatan atau dokumentasi, pendaftaran atau registrasi, kersipan dan sebagainya.

2. Administrasi Sebagai Administrasi negara/ Pemerintahan

Pengertian ini dijabarkan melalui persamaan arti antara *administratie* dan *bestuur*, *benstuur* lebih identik dengan pemerintahan dalam istilah Bahasa Indonesia sehingga pengertian administrasi disamakan dengan pemerintahan.

3. Administrasi Sebagai Manajemen

Administrasi dan manajemen adalah dua hal berbeda karena administrasi lebih sering digunakan dalam administrasi negara, sedangkan manajemen lebih sering digunakan dalam administrasi niaga. Meskipun demikian, dalam konteks kekinian manajemen sudah diterapkan

dalam urusan-urusan kenegaraan. Sebagai contoh adalah pemakaian kata manajemen kepegawaian dan administrasi kepegawaian.

4. Administrasi Sebagai Proses

Administrasi maupun manajemen merupakan suatu kegiatan tetapi kegiatannya berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada administrasi sebagai tingkat perumusan kebijakan dan manajemen berada pada tingkat pelaksanaan kebijakan dimana manajemen sebagai salah satu sarana atau unsur dari Administrasi yang bersifat dinamis. Administrasi sebagai suatu proses atau suatu kegiatan menurut Siagian diartikan sebagai keseluruhan kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (dalam Zauhar, 1992:10).

Administrasi pembangunan dalam perkembangannya lebih mengaitkan pada agenda negara yang sedang membangun pada konteks sosial masyarakatnya. Menurut Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya (1988 :15-17) studi pembangunan dalam ilmu sosial adalah upaya masyarakat bangsa untuk mencapai perubahan sosial yang besar ke arah yang lebih maju sesuai pandangan masyarakat itu sendiri.

Administrasi pembangunan yang perlu ditekankan pertama kali adalah perencanaan yang merupakan langkah awal dari

administrasi seperti yang diungkapkan Tjokroamidjojo (1988, h.33).

Hakim (2011: 40) mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai upaya mendorong masyarakat ke arah modernisasi bersifat multi-dimensional secara administratif melalui serangkaian proses yang dilakukan oleh administrator.

Pendekatan Sektoral

Perencanaan pembangunan harus memperhatikan kondisi wilayah dalam prosesnya. Wilayah yang nantinya akan digunakan untuk merencanakan pembangunan harus jelas manfaatnya agar kegiatan yang sudah direncanakan berjalan efektif.

Pendekatan sektoral merupakan pendekatan dari perencanaan pembangunan di suatu wilayah. Menurut Tarigan (2012:36-43) pendekatan sektoral fokus pada sektor-sektor tertentu di suatu wilayah dengan mengelompokkan kegiatan ekonomi yang seragam atau yang dianggap seragam. Selanjutnya, melihat peluang dan potensi yang bisa dikembangkan dari masing-masing sektor tersebut.

Kelemahan metode ini (pendekatan sektoral) adalah bahwa pada kenyataannya kadang-kadang ada sektor jasa yang merupakan faktor pendorong pertumbuhan daerah termasuk pendorong pertumbuhan sektor barang, apabila peranan sektor pariwisata cukup menonjol di

suatu daerah, sektor ini harus diperhitungkan sebagai sektor dasar dan dikelompokkan ke dalam sektor yang menunjang pertumbuhan sektor lainnya. Demikian pula, apabila sektor perdagangan di suatu perkotaan merupakan pusat perdagangan daerah-daerah sekitarnya maka perkembangannya tidak ditentukan oleh perkembangan sektor penghasil barang di daerah itu saja melainkan juga oleh perkembangan sektor penghasil barang di daerah itu dan daerah sekitarnya.

Aspek Penunjang Pembangunan Pertanian

Pada sektor pertanian lahan adalah faktor penting untuk memproduksi tanaman pangan sehingga keberadaannya harus tetap dijaga dan dilindungi demi keberlangsungan produktivitas tanaman pangan. Pertanian yang menggantungkan produktivitasnya terhadap alam membuat unsur lingkungan menjadi faktor krusial, pertanian turut berperan dalam hal memelihara kesuburan tanah, kebutuhan akan ruang hijau, dan keberlangsungan ekosistem pada umumnya. Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya melakukan kegiatan di sektor pertanian sehingga dapat dikatakan pertanian mempunyai fungsi vital seperti yang dipaparkan oleh Tohir (dalam Husnah, 2005:13):

1. Pertumbuhan pendapatan (produk) nasional ataupun pertumbuhan pendapatan (produk) perkapita.
2. Pertumbuhan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri
3. Pertumbuhan sumber-sumber kehidupan yang lain yang non agraris

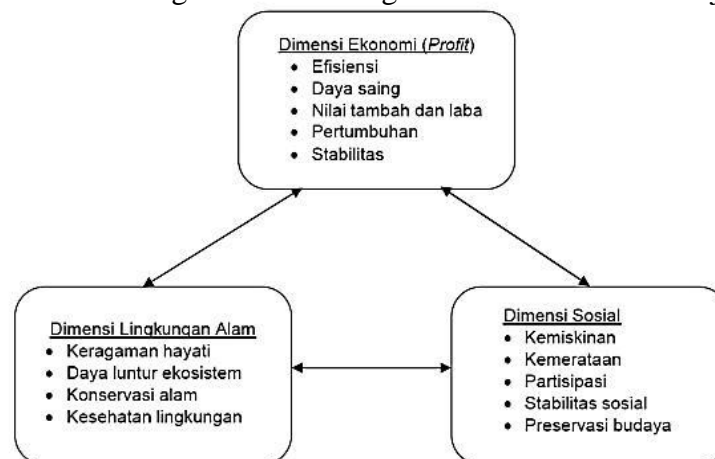
Dengan melihat pentingnya peran pertanian di atas maka pembangunan pertanian turut menjaga keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat sehingga pembangunan keberlanjutan dapat dilaksanakan sesuai tiga dimensi pembangunan yang disebutkan di atas.

Pembangunan pertanian berkelanjutan merasa perlu dilakukan sebagai negara agraris, di mana pertanian menjadi tumpuan pembangunan ekonomi. Pada kondisi krisis moneter yang diikuti krisis ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini, sektor pertanian tumbuh positif sementara sektor lainnya tumbuh negatif, hal tersebut membuktikan bahwa

pembangunan pertanian perlu didorong untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Menurut Hanafie (2010:37) pembangunan pertanian harus didorong dengan upaya penyempurnaan baik dalam berbagai bidang maupun dalam penyediaan prasarana. Pembangunan pertanian dilakukan dengan pendekatan berwawasan lingkungan yang artinya kegiatan pertanian disamping memanfaatkan sumberdaya, juga melestarikan dan kalau mungkin meningkatkan produktivitasnya. Bersamaan dengan itu, upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pertanian terus diupayakan agar dampak negatifnya dapat diminimalkan dan kelesatarian hidup dapat dipertahankan. Upaya insentif investasi bagi sektor swasta akan selalu dikaitkan dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan.

Gambar 1. Tiga Pilar Pembangunan Pertanian Berkelanjutan



Sumber: Kuswaji (2010)

Menurut Soekartawi dalam Husnah (2005: 18-20) ada 6 aspek. Adapun aspek yang dimaksud adalah:

a. Kebijakan infrastruktur

Adalah kebijakan yang menyangkut kegiatan pembangunan sarana transportasi dari pusat informasi ke daerah penerima informasi. Fungsi sarana transportasi memang sepantasnya mempunyai peran penting dalam pembangunan pertanian. b. Irigasi

Peran irigasi dalam pembangunan pertanian juga memegang peran penting karena faktor produksi air yang tersedia dalam jumlah yang cukup akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian. c. Program intensifikasi

Program intensifikasi pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian per satuan luas. Program intensifikasi ini akan memberikan dampak yang positif jika faktor yang mempengaruhi adanya senjang produktifitas itu diketahui.

d. Padat karya

Program padat karya ditujukan untuk mengurangi jumlah pengangguran tenaga kerja di pedesaan. Semisal, pelaksanaan program padat karya diluar musim panen atau saat musim kemarau tiba, oleh karenanya program ini bersifat program

massal yang memerlukan banyak tenaga kerja.

e. Subsidi desa

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada penduduk desa dimaksudkan untuk membangun desanya. Penggunaan subsidi ini pada umumnya diarahkan pada kegiatan yang produktif dan mempunyai dampak ekonomi yang positif bagi warga desa.

f. Koperasi Unit Desa (KUD) dan program pedesaan yang lain

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dimana kekuasaan tertinggi berada di anggotanya. Perkembangan KUD ini mengalami perkembangan tiap tahunnya seiring fungsinya yang strategis dalam kegiatan pengadaan pangan.

Kebijakan Bahan Pangan

Kebijakan publik dalam definisi Dye adalah *whatever governments choose to do or not to do*. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang bersifat aktif (melakukan perbuatan dalam memecahkan masalah) maupun pasif (tidak melakukan apapun dalam memecahkan masalah) merupakan suatu kebijakan yang telah ditempuh.

Definisi kebijakan publik menurut Carl Friedrich dan

Anderson dalam Santosa (2008: 35) adalah seperangkat tindakan pemerintah dengan tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan guna mengatasi sesuatu masalah.

Definisi kebijakan lainnya menurut Anderson dalam Indiahono (2009:17) adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik kepentingan di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. Dari definisi tersebut sebuah kebijakan dirumuskan dengan melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan yang sering disebut stakeholder. Dalam pelibatan tersebut kebijakan menjadi ranah yang amat berbau kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan kepada masing-masing pihak. Sehingga kebijakan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Presthus dalam Santosa (2008:29) menerjemahkan makna kebijakan, kemudian membedakan kebijakan (policy) dengan keputusan (decision). Secara

konseptual, kebijakan dibedakan dari administrasi dan tidak harus berkonotasi dengan politik oleh karena itu kita mengenal kebijakan pribadi, kebijakan sekolah, kebijakan niaga, dan sebagainya. Meskipun demikian, setiap kebijakan tanpa memandang popularitas dan rasionalitas memerlukan sumberdaya administrasi.

Sementara itu Santosa (2008:29) kebijakan publik yang menjadi sumberdaya utama adalah kepentingan publik. Selain itu banyak pihak yang terlibat dalam kebijakan publik, mereka adalah pendapat publik, media massa, kelompok elite, kelompok-kelompok penekan, partai politik, para birokrat, anggota DPR, dan lembaga-lembaga peradilan.

Bahan pangan menjadi faktor penting dalam ketersediaan pangan yang mencukupi bagi masyarakat yang tinggal di suatu daerah/wilayah. Secara nasional, ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi warga negara dapat diperoleh dari hasil produksi sendiri bukan melalui impor. Dengan begitu suatu negara tidak perlu lagi mengeluarkan devisa negara untuk membeli beras dari negara lain sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan sektor lain.

Pelaksanaan pembangunan pertanian oleh Kartasapoetra (1986:17) merupakan keselarasan pembangunan pertanian dan pembangunan industri, merupakan garis kebijakan

pembangunan yang mantap karena :

1. Keberhasilan pembangunan pertanian di satu pihak akan mencukupi segala kebutuhan pokok rakyat Indonesia yaitu kebutuhan akan pangan dan sandang (contoh: kain dibuat dari kapas, kapuk dan serat), dan di sisi lain melepaskan ketergantungan kebutuhan pangan dari negara lain.
2. Kebijakan industri untuk memanfaatkan segala bahan baku yang terdapat di tanah air, antara lain produk-produk pertanian, dengan demikian surplus produk pertanian untuk di ekspor akan berwujud barang-barang jadi (minimal setengah jadi), sehingga devisa lebih meningkat serta pengangguran dapat dikurangi.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan maka kebijakan perlu diarahkan dalam upaya pemenuhan pangan dalam rangka mencapai swasembada. Swasembada menurut Prayitno (1987: 15) adalah kondisi tercukupinya kebutuhan (pangan) pokok dari dalam negeri pada tingkatan tertentu. Kondisi yang dimaksud adalah tidak adanya impor komoditi pangan yang dimaksud.

Kebutuhan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat tidak harus melalui satu komoditi tertentu yaitu beras. Ketergantungan pada bahan pangan tertentu akan menihilkan

keberadaan potensi bahan pangan lain yang seharusnya bisa dijadikan sumber bahan pangan alternatif.

Potensi pangan alternatif seperti jagung, sukun, sagu, umbi-umbian, dan sebagainya bisa dikembangkan sebagai bahan pangan sesuai potensi yang dimiliki daerah sebagai salah satu wujud kemandirian pangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pangan beras.. Pemenuhan bahan pangan berbasis potensi daerah dapat diwujudkan melalui diversifikasi pangan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Suryabrata (1983: 19) penelitian deskriptif merupakan akumulasi data dengan cara deskriptif, tidak perlu mencari hipotesis, membuat saling berhubungan dan ramalan walaupun penelitian bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut termuat dalam metode-metode deskriptif. Untuk pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang disajikan berupa bilangan atau angka yang selanjutnya dianalisis dengan teknik scalling dan rescaling.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pacitan karena sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar pada PDRB tahun 2008-2012 namun mengalami penurunan

(39,92/39,21/38,04/37,15/36,56). Selain itu, penduduk mayoritas bekerja di sektor pertanian dan penting untuk menyediakan bahan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat sesuai potensi yang dimiliki daerah.

Variabel penelitian yaitu luas lahan sawah melalui perbandingan luas lahan sawah dengan luas lahan total (Hektar), keteririgasian lahan sawah melalui perbandingan luas lahan irigasi dengan luas sawah keseluruhan (Hekar) dan produktivitas tanaman bahan makanan melalui perbandingan produksi tanaman dengan luas panen tanaman (Kwintal). Tanaman yang dimaksud adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai.

Teknik pengumpulan data menggunakan data yang telah tersedia selanjutnya disebut data

sekunder dari Pacitan Dalam Angka 2013 dan dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik scalling dan rescaling disajikan dalam bentuk tabel interval.

Berikut rumus scalling untuk memperoleh skala pengukuran interval :

$$\text{Rumus scalling} = \frac{N - N_{\min}}{N_{\max} - N_{\min}} \times k$$

Keterangan:

N = Nilai wilayah yang dicari (kecamatan)

Nmin = Nilai terendah dari keseluruhan (kabupaten)

Nmax = Nilai tertinggi dari keseluruhan (kabupaten)

K = Konstanta (angka 100 sebagai koefisien)

Tabel 2. Klasifikasi Potensi Pertanian

Nilai <i>Scalling</i> dan <i>Rescaling</i>	Kriteria	Klasifikasi
81-100	Sangat baik	I
61-80	Baik	II
41-60	Cukup	III
21-40	Kurang	IV
0-20	Sangat Kurang	V

B. HASIL DAN PEMBAHASAN Potensi Luas Lahan Sawah Kabupaten Pacitan Tahun 2012

Potensi luas lahan sawah setelah dianalisis menggunakan teknik scalling, kecamatan yang memiliki prioritas (di atas 40%) untuk

dikembangkan adalah Kecamatan Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo dan Sudimoro. Potensi luas lahan sawah rata-rata memiliki klasifikasi sangat baik dan cukup. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah menjaga lahan subur dengan mencegah alih fungsi lahan ke non pertanian.

Potensi Keteririgasian Lahan Sawah Kabupaten Pacitan Tahun 2012

Potensi keteririgasian lahan sawah setelah dianalisis menggunakan teknik scalling, kecamatan yang memiliki prioritas (di atas 40%) untuk dikembangkan adalah Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Bandar, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo dan Sudimoro. Potensi keteririgasian lahan sawah rata-rata memiliki potensi baik. Keteririgasian lahan diperlukan dalam jumlah yang cukup sehingga infrastruktur pendukung dalam menjaga ketersediaan air di musim penghujan dan kemarau sekiranya perlu diperhatikan.

Potensi Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Pacitan Tahun 2012

Berdasarkan hasil scalling, diantara tujuh tanaman pangan yang telah disebutkan, potensi tanaman bahan makanan yang cocok dikembangkan di Kabupaten Pacitan adalah ubi jalar. Dari 12 kecamatan, 10 diantaranya ubi jalar mempunyai klasifikasi rata-rata sangat baik yaitu Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tegalombo dan Tulakan. Sehingga, penguatan bahan pangan ubi jalar dapat dikembangkan di wilayah tersebut.

a. Produktivitas Tanaman Padi

Luas panen tanaman padi Kabupaten Pacitan Tahun 2012 seluas 35.198 Ha sedangkan total produksi tanaman padi sebesar 178.767 Ton. Kecamatan Pringkuku sebagai penghasil tanaman padi terbesar dengan 27.207 Ton dan yang terkecil adalah Kecamatan Sudimoro dengan 6496 Ton.

Tabel 3. Klasifikasi Potensi Tanaman Padi Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rasio	Scalling	Klasifikasi
1	Donorojo	6148	22189	360,91	0,00	V
2	Punung	5348	24474	457,63	30,30	IV
3	Pringkuku	5698	27207	477,48	36,52	IV
4	Pacitan	2187	13250	605,85	76,73	II

5	Kebonagung	2208	15017	680,12	100,00	I
6	Arjosari	1705	10089	591,73	72,31	II
7	Nawangan	1768	9523	538,63	55,68	III
8	Bandar	2245	13311	592,92	72,68	II
9	Tegalombo	1864	11204	601,07	75,24	II
10	Tulakan	3363	17066	507,46	45,91	III
11	Ngadirojo	1482	8941	603,31	75,94	II
12	Sudimoro	1182	6496	549,58	59,10	III

Sumber: data diolah

b. Produktivitas Tanaman Jagung

Luas panen tanaman jagung Kabupaten Pacitan tahun 2012 sebesar 22.537 Ha sedangkan total produksi di tahun 2012 sebesar 138.297 Ton. Kecamatan Bandar adalah penghasil tanaman jagung terbesar dengan 34.386 Ton dan yang terkecil adalah Kecamatan Ngadirojo sebesar 401 Ton.

Tabel 4. Klasifikasi Potensi Tanaman Jagung Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rasio	Scaling	Klasifikasi
1	Donorojo	2469	12264	496,72	25,44	IV
2	Punung	4223	32463	768,72	100,00	I
3	Pringkuku	4127	25725	623,33	60,15	III
4	Pacitan	110	493	448,18	12,14	V
5	Kebonagung	27	125	462,96	16,19	V
6	Arjosari	487	2219	455,65	14,19	V
7	Nawangan	2150	14194	660,19	70,25	II
8	Bandar	6380	34386	538,97	37,02	IV
9	Tegalombo	2225	14877	668,63	72,56	II
10	Tulakan	154	622	403,90	0,00	V
11	Ngadirojo	77	401	520,78	32,04	IV
12	Sudimoro	108	528	488,89	23,30	IV

Sumber: data diolah

c. Produktivitas Tanaman Ubi Kayu

Luas panen tanaman ubi kayu Kabupaten Pacitan tahun 2012 sebesar 23.773 Ha sedangkan total produksi di tahun 2012 sebesar 499.730 Ton. Kecamatan Pringkuku adalah penghasil tanaman ubi kayu terbesar dengan 97.878 Ton dan yang terkecil adalah Kecamatan Kebonagung sebesar 6088 Ton

Tabel 5. Klasifikasi Potensi Tanaman Ubi Kayu Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rasio	Scaling	Klasifikasi
1	Donorojo	3470	46638	1344	0,00	V
2	Punung	2419	49320	2039	54,91	III
3	Pringkuku	4308	97878	2272	73,34	II
4	Pacitan	1117	23258	2082	58,34	III
5	Kebonagung	306	6088	1990	51,01	III
6	Arjosari	887	18629	2100	59,76	III
7	Nawangan	917	19767	2156	64,14	II
8	Bandar	3251	84831	2609	100,00	I
9	Tegalombo	2467	57768	2342	78,84	II
10	Tulakan	2778	58072	2090	58,99	III
11	Ngadirojo	1075	22056	2052	55,93	III
12	Sudimoro	778	15425	1983	50,47	III

Sumber: data diolah

d. Produktivitas Tanaman Ubi Jalar

Luas panen tanaman ubi jalar Kabupaten Pacitan tahun 2012 sebesar 152 Ha sedangkan total produksi di tahun 2012 sebesar 1355 Ton. Kecamatan Tulakan

adalah penghasil tanaman ubi jalar terbesar dengan 551 Ton dan yang terkecil adalah Kecamatan Ngadirojo sebesar 0 Ton (tidak berpotensi).

Tabel 6. Klasifikasi Potensi Tanaman Ubi Jalar Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rasio	Scaling	Klasifikasi
1	Donorojo	2	18	900	94,74	I
2	Punung	9	83	922	97,08	I
3	Pringkuku	9	80	889	93,57	I
4	Pacitan	18	156	867	91,23	I
5	Kebonagung	2	16	800	84,21	I
6	Arjosari	2	19	950	100,00	I
7	Nawangan	27	245	907	95,52	I
8	Bandar	8	76	950	100,00	I
9	Tegalombo	10	82	820	86,32	I
10	Tulakan	61	551	903	95,08	I

11	Ngadirojo	0	0	0	0,00	V
12	Sudimoro	4	29	725	76,32	II

Sumber: data diolah

e. Produktivitas Kacang Tanah

Tanaman

Luas panen tanaman kacang tanah Kabupaten Pacitan tahun 2012 sebesar 9.440 Ha sedangkan total produksi di tahun 2012 sebesar 10.304 Ton. Kecamatan

Punung adalah penghasil tanaman kacang tanah terbesar dengan 3.733 Ton dan yang terkecil adalah Kecamatan Tulakan sebesar 57 Ton.

Tabel 7. Klasifikasi Potensi Tanaman Kacang Tanah

Kecamatan	Luas panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rasio	Scaling	Klasifikasi
Donorojo	3269	3462	106	10.89	V
Punung	3678	3733	101	0.00	V
Pringkuku	1065	1512	142	100.00	I
Pacitan	388	398	103	2.67	V
Kebonagung	67	72	107	14.74	V
Arjosari	273	291	107	12.60	V
Nawangan	232	278	120	45.29	III
Bandar	150	159	106	11.13	V
Tegalombo	66	92	139	93.63	I
Tulakan	52	57	110	20.06	V
Ngadirojo	134	169	126	60.84	III
Sudimoro	66	81	123	52.45	III

Sumber: data diolah

f. Produktivitas Kedelai

Tanaman

Luas panen tanaman kedelai Kabupaten Pacitan tahun 2012 sebesar 4.308 Ha sedangkan total produksi di tahun 2012 sebesar

4.407 Ton. Kecamatan Donorojo adalah penghasil tanaman kedelai terbesar dengan 1.443 Ton dan yang terkecil adalah Kecamatan Tegalombo sebesar 218 Ton.

Tabel 8. Klasifikasi Potensi Tanaman Kedelai Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rasio	Scaling	Klasifikasi
1	Donorojo	1515	1443	95,25	40,33	IV
2	Punung	827	808	97,70	44,51	III
3	Pringkuku	334	239	71,56	0,00	V
4	Pacitan	463	568	122,68	87,02	I
5	Kebonagung	76	75	98,68	46,18	III
6	Arjosari	222	261	117,57	78,32	II
7	Nawangan	165	157	95,15	40,16	IV
8	Bandar	50	46	92,00	34,80	IV
9	Tegalombo	18	21	116,67	76,79	II
10	Tulakan	96	89	92,71	36,00	IV
11	Ngadirojo	330	430	130,30	100,00	I
12	Sudimoro	212	270	127,36	94,99	I

Sumber: data diolah

g. Produktivitas Tanaman Kacang Hijau

Luas panen tanaman kacang hijau Kabupaten Pacitan tahun 2012 sebesar 48 Ha sedangkan total produksi di tahun 2012 sebesar 59 Ton. Kecamatan Pringkuku adalah

penghasil tanaman kacang hijau terbesar dengan 16 Ton dan yang terkecil adalah Kecamatan Nawangan, Bandar, Tegalombo, Tulakan dan Ngadirojo sebesar 0 Ton (tidak potensial).

Tabel 9. Klasifikasi Potensi Tanaman Kacang Hijau Tahun 2012

No	Kecamatan	luas panen (Ha)	produksi (Ton)	rasio	scaling	klasifikasi
1	Donorojo	11	14	127,27	95,45	I
2	Punung	7	9	128,57	96,43	I
3	Pringkuku	12	16	133,33	100,00	I
4	Pacitan	2	2	100,00	75,00	II
5	Kebonagung	6	7	116,67	87,50	I
6	Arjosari	3	3	100,00	75,00	II
7	Nawangan	0	0	0,00	0,00	V

8	Bandar	0	0	0,00	0,00	V
9	Tegalombo	0	0	0,00	0,00	V
10	Tulakan	0	0	0,00	0,00	V
11	Ngadirojo	0	0	0,00	0,00	V
12	Sudimoro	7	8	114,29	85,71	I

Sumber: data diolah

Rescalling Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Pacitan Tahun 2012

Rescalling merupakan penjumlahan dari seluruh potensi yang diteliti menunjukkan bahwa Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tegalombo, Ngadirojo dan Sudimoro memiliki klasifikasi sangat baik untuk dikembangkan

sebagai daerah penghasil bahan pangan secara keseluruhan. Namun, ubi jalar juga dapat dikembangkan berdasarkan hasil scalling dan rescalling. Hal tersebut dikarenakan tanaman ubi jalar memiliki nilai interval lebih dari 40% (prioritas) baik dari hasil scalling maupun rescalling.

Gambar 2. Hasil Rescalling potensi bahan pangan Kabupaten Pacitan



Sumber: data diolah

Keterangan
:

I	81-100	SANGAT BAIK
II	61-80	BAIK
III	41-60	CUKUP
IV	21-40	KURANG
V	0-20	SANGAT

KURANG

Kebijakan Bahan Pangan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah membuat kebijakan dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah yang dimuat dalam RPJMD 2011-2016 melalui program

pembangunan daerah. Namun, outcome dari program prioritas peningkatan ketahanan pangan belum mengarah pada potensi yaitu ketersediaan tanaman ubi jalar maupun kecamatan yang dikembangkan sebagai penghasil tanaman ubi jalar.

Tabel 10. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Outcome
Ketersediaan pangan daerah	Penguatan cadangan pangan	Peningkatan produksi ketersediaan pangan secara berkelanjutan	Peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita; penguatan cadangan pangan; ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah; stabilitas harga dan pasokan

				pangan; skor pola pangan harapan (konsumsi dan ketersedia an); pengawasa n dan pembinaan keamanan pangan; penangana n daerah rawan pangan
			Program peningkata n produksi pertanian/ perkebuna n	Produktivi tas tanaman pangan (ku/ha); produktivi tas hasil perkebuna n (ton/ha): cengkeh, kelapa, kopi, nilam, lada,

				kapas, kakao
			Program peningkata n produksi hasil peternakan	Produksi hasil peternakan : daging (kg), telur (kg), susu (ltr)
			Program pengemba ngan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (kolam, karamba, minapadi) (kg)
			Program pengemba ngan perikanan tangkap	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tidak harus selalu terkonsentrasi pada bahan pangan beras. Bahan pangan beras sendiri seolah menjadi bahan pangan wajib untuk masyarakat, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Penguatan bahan pangan yang cenderung terkonsentrasi pada

beras saja seolah meniadakan bahan pangan alternatif lainnya. Untuk itu perlu adanya diversifikasi pangan dengan melihat potensi yang ada di daerah guna mengurangi ketergantungan pada beras sebagai bahan pangan masyarakat.

Pemilihan program dilakukan dengan memilih program prioritas untuk menunjang pembangunan daerah sesuai strategi yang dipilih.

Pemilihan program pembangunan daerah dalam rangka peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Pacitan masih sebatas program umum, dalam artian belum ada tanaman bahan makanan dan Kecamatan secara khusus yang harus dikembangkan dalam program untuk menjaga ketahanan pangan sesuai potensi daerah.

Setelah diketahui potensi bahan pangan ubi jalar maka outcome program prioritas peningkatan ketahanan pangan harus mengarah pada ketersediaan tanaman ubi jalar, penguatan cadangan tanaman ubi jalar, ketersediaan informasi pasokan tanaman ubi jalar, harga dan akses pangan tanaman ubi jalar, stabilitas harga dan pasokan tanaman ubi jalar, konsumsi tanaman ubi jalar, pengawasan dan pembinaan keamanan tanaman ubi jalar, penanganan daerah rawan pangan. Untuk penanganan daerah rawan pangan dapat ditentukan daerah/kecamatan yang dapat dikembangkan sebagai penghasil tanaman ubi jalar.

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa potensi bahan makanan yang cocok dikembangkan di Kabupaten Pacitan sesuai potensi adalah ubi jalar. Ubi jalar tersebut dapat dikembangkan di Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari,

Nawangan, Bandar, Tegalombo dan Tulakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan daerah.

Sedangkan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan telah diatur program untuk meningkatkan ketahanan pangan namun program tersebut masih secara umum, tidak disebutkan secara spesifik tanaman beserta wilayah yang akan dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Pacitan

D. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. Pacitan Dalam Angka. Pacitan, BPS
- Hakim, L., EM. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jogjakarta, Ar-Ruzz Media.
- Hanafie, R. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Husnah, M. (2005). *Analisis Potensi Daerah Sektor Pertanian Sebagai Pedoman Dalam Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Kediri)*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kuswaji, D.P. (2010). *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Daerah Rawan Longsor Lahan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada tanggal 10 November 2014 dari geo.fis.unesa.ac.id/berkas/naskah/kuswaji.pdf

- Prayitno, H. (1987). *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Yogyakarta, BPFE.
- Produk Domestik Bruto Kabupaten Pacitan Tahun 2008-2012. Pacitan, BPS.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016. Pacitan, Bappeda.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung, Refika Aditama.
- Suryabrata, S. (1983). *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Rajawali.
- Tarigan, R. (2012). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*: ed. Revisi. Jakarta, Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo B. (1988). *Pengantar Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta, LP3ES.
- Tjokroamidjojo B., Mustopadidjaya A. R. (1988). *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta, LP3ES.
- Yustika, E.A. (2002). *Pembangunan dan Krisis Memetakan Perekonomian Indonesia*. Jakarta, Grasindo.
- Zauhar, S. (1992). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Malang: PPIIS Unibraw

Jurnal

- Sampurna, R., & Irwandi, N. (2017). Analisis Kebutuhan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Litbang) Di Kabupaten Bandung. *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 1 - 11.
Doi:[Http://Dx.Doi.Org/10.15575/Jp.V7i1.1731](http://Dx.Doi.Org/10.15575/Jp.V7i1.1731)
- Dulkiah, M. (2017) Peranan Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat. *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 30 - 49
Doi:[Http://Dx.Doi.Org/10.15575/Jp.V7i1.1735](http://Dx.Doi.Org/10.15575/Jp.V7i1.1735)
- Engkus, N. (2017) Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 91 - 101
Doi:[Http://Dx.Doi.Org/10.15575/Jp.V7i1.1739](http://Dx.Doi.Org/10.15575/Jp.V7i1.1739)